

DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 1 KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Mentari Okta W.U

12040674066 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: mentariokta1@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

00290774004 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu program yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Kebijakan sertifikasi guru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan. Kebijakan sertifikasi guru di SMPN 1 Kauman dipilih karena merupakan salah satu SMPN yang memperoleh penghargaan sebagai sekolah berintegritas yang diberikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sementara itu, fokus penelitian ini menggunakan model analisis dampak riset kebijakan publik Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli Jr yang menganalisis dampak dengan menelusuri program, tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan kriteria efektifitas. Berdasarkan hasil penelitian dampak kebijakan sertifikasi guru SMPN 1 Kauman terdapat dampak yang dikehendaki yaitu; 1) kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik; 2) guru lebih profesional dan disiplin dalam profesinya; 3) kesejahteraan guru menjadi lebih meningkat; 4) guru lebih termotivasi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 5) pengakuan atas kinerja guru. Sedangkan dampak yang tidak dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru ialah guru lebih banyak menuruti keinginannya sebagai individu konsumtif dan guru cepat berpuas diri dengan apa yang telah dicapai sehingga tidak mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, asumsi guru yang menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari kemampuan guru mengakibatkan guru cepat puas setelah menerima sertifikasi tersebut. Sebaiknya, kedepannya guru menganggap sertifikasi guru sebagai titik awal dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan profesional sebagaimana standar dari pemerintah bagi guru yang diharapkan mampu diaplikasikan untuk sekolahnya guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan

Kata Kunci: Dampak Kebijakan, Sertifikasi Guru

Abstract

Policies teacher certification is a program that is implemented through accredited and designated LPTK government by awarding certificates to teachers who have successfully participated in the program. Teacher certification policies stipulated in Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 5 Year 2012 on Certification of Teacher In Position. Teacher certification policies in SMPN 1 Kauman chosen because it is one of the junior high school received an award as the integrity of the school granted by the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia. The purpose of this study is to describe and analyze the impact of teacher certification policies in SMPN 1 Kauman, Tulungagung district. Research type used in this research is descriptive with qualitative approach. The technique of making the informants in this study using purposive sampling technique. Meanwhile, the focus of this study using a model analysis of the impact of public policy research Thomas J. Cook and Frank P. Schioli Jr. which analyzes the impact of the program or policy, objectives, activities, and effectiveness criteria. Based on the research impact of teacher certification policies SMPN 1 Kauman contained the desired effect, namely; 1) the ability and competence of teachers for the better; 2) teachers more professional and disciplined in his profession; 3) the welfare of teachers to be more increased; 4) teachers are more motivated improve science and technology; 5) recognition of the performance of teachers. While the impact is not desired from the teacher certification policies are more teachers indulged as individuals and teachers konsumtif complacent with what has been achieved so did not develop the competencies and capabilities. Thus, the assumption that consider teacher certification as the ultimate goal of the ability of teachers has resulted in rapid teachers satisfied after receiving the certification. Instead, the future teachers consider teacher certification as a starting point in improving the capabilities and professional skills as well as the standard of government for teachers who are expected to be applied to the school in order to improve the quality and the quality of education

Keyword: *Policy Impact, Teacher Certification*

PENDAHULUAN

Kualitas SDM yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia masa kini dan masa yang akan datang adalah yang mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas SDM yang demikian itu dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 (ayat 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Sebagai implementasi pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang diamanatkan dalam UU No.20 Tahun 2003 tersebut. Keluarlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, yang substansinya mengatur tentang kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan, Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dengan kata lain guru tersebut memiliki kemampuan pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang guru dan dosen.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tersebut maka lahirlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan serta keberhasilan pendidikan nasional. Salah satu dari standar tersebut adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Peraturan Pemerintah tersebut berkenaan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi. Kualifikasi akademik dan kompetensi yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah tersebut melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini lah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program sertifikasi guru yang melahirkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Nomor 5 Tahun 2012.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang dimaksud dengan sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Guru dalam jabatan yang selanjutnya disebut guru adalah guru yang telah diangkat menjadi guru sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Melalui program ini diharapkan mampu mendongkrak peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran ke arah yang lebih baik (Hurmaini, 2011)

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik (Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005). Program sertifikasi guru adalah suatu program yang dilakukan pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

Pelaksanaan sertifikasi guru yang ada di Kabupaten Tulungagung salah satunya yang ada di SMPN 1 Kauman Tulungagung. SMPN 1 Kauman merupakan SMP Negeri yang berada di Kecamatan Kauman dan merupakan salah satu SMP unggulan di Kabupaten Tulungagung. Guru di SMPN 1 Kauman hampir 96% sudah mengikuti program sertifikasi guru. SMPN 1 Kauman merupakan salah satu SMPN di Kabupaten Tulungagung yang bisa dibilang sebagai sekolah favorit karena SMPN 1 Kauman bisa mempertahankan kualitas dan juga lulusan yang ada. Selain itu, SMPN 1 Kauman dapat dibuktikan sebagai salah satu sekolah yang memperoleh banyak prestasi baik bidang akademik maupun non-akademik. SMPN 1 Kauman juga merupakan sekolah Adiwiyata dan pada tahun 2015 Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada SMPN 1 Kauman sebagai Sekolah Berintegritas Dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional. Dari Jawa Timur sendiri SMPN terbaik dari Kabupaten Tulungagung ialah SMPN 1

Tulungagung, SMPN 2 Tulungagung, SMPN 1 Kauman, SMPN 1 Ngunut dan SMPN 3 Tulungagung yang diakui oleh Kemendikbud sebagai SMPN dengan prestasi yang baik. (<http://bobobibi.com/daftar-smp-terbaik-di-indonesia-versi-kemendikbud-2015/>) Alasan tersebut, yang membuat peneliti untuk memilih SMPN 1 Kauman Sebagai Penelitian tentang dampak kebijakan sertifikasi guru.

SMPN 1 Kauman bisa mempertahankan prestasi yang diperoleh dengan adanya campur tangan dari pemerintah untuk mempertahankan kualitas pendidikan yang ada dengan adanya kebijakan yang mendukung. Seperti program kebijakan yang lainnya, sertifikasi guru diharapkan mampu membawa nilai positif terhadap kemajuan pendidikan dan juga mengurangi permasalahan yaitu sebagian guru tidak bisa memenuhi beban mengajar seperti yang terdapat pada kebijakan sertifikasi guru.

Tujuan sertifikasi guru yang dilaksanakan di SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung sesuai peraturan sertifikasi guru, yaitu Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, Meningkatkan martabat guru, dan Meningkatkan profesionalitas guru. Tujuan sertifikasi tersebut merupakan apa yang akan dicapai untuk menuntun kegiatan sertifikasi guru yang ada di SMPN 1 Kauman. Kegiatan tersebut ialah MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) yaitu musyawarah yang dilakukan oleh guru-guru di SMPN 1 Kauman setelah mengikuti MGMP tingkat provinsi dengan membahas masalah dalam kegiatan belajar mengajar yang dirasa dapat membantu guru-guru dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

Sertifikasi guru di SMPN 1 Kauman dapat dikatakan berhasil jika efektifitas program tercapai. Pencapaian kriteria efektifitas dapat dilihat dari jumlah guru yang sudah mengikuti program sertifikasi, memenuhi beban jam mengajar dan juga bisa membuat laporan penelitian setiap tahunnya. Selain itu kriteria efektifitas yang tidak secara langsung bisa dirasakan ialah dengan adanya peningkatan mutu pembelajaran yang disebabkan karena adanya motivasi guru untuk mengajar (Suwardi, 2012).

Kriteria efektifitas sertifikasi guru ialah terpenuhinya beban jam mengajar 24jam/minggu, penelitian ilmiah dapat tercapai, mengikuti MGMP untuk peningkatan kompetensi dan kemampuan guru, membuat laporan penilaian pembelajaran terhadap kompetensi dan kemampuan guru.

Berdasarkan pernyataan diatas, laporan penelitian ini membahas tentang dampak Kebijakan Sertifikasi Guru yang ada, khususnya yang terdapat di SMPN 1 Kauman. Sertifikasi guru mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dengan tambahan tunjangan yang diterima guru setelah memperoleh sertifikat, meningkatkan mutu pendidik dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dengan adanya kewajiban membuat laporan penelitian setiap tahun, mengakui kualitas guru, dimana dengan adanya sertifikasi guru yang prosesnya harus melalui beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga guru diakui kualitas dan kemampuan yang dimiliki, dan secara tidak langsung akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia karena para pendidik mendapatkan pengakuan sebagai tenaga pendidik yang layak (Suwardi, 2012). Untuk itu peneliti ingin melihat dampak dari pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru yang ada dan dampak yang diharapkan sudah terpenuhi atau belum. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori model analisis dampak (Policy Impact Model) yang dikemukakan oleh Thomas K. Cook dan Frank P. Schioli. Dalam teori ini peneliti akan membahas tentang program, tujuan, kegiatan/aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi tujuan, kriteria efektivitas dari kegiatan yang dilakukan dan akhirnya akan memunculkan aspek dampak. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui "DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMPN 1 KAUMAN KABUPATEN TULUNGAGUNG".

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah "Bagaimana Dampak Kebijakan Sertifikasi Guru di Sekolah Menengah Pertama Kauman 1 Kabupaten Tulungagung"?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan dampak kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Pertama 1 Kauman Kabupaten Tulungagung.

MANFAAT

1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada semua pembaca dalam bidang kebijakan publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Mahasiswa
Diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang kebijakan publik khususnya mengenai dampak suatu kebijakan pendidikan, sehingga

dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan penelitian selanjutnya.

- b. Bagi Universitas Negeri Surabaya
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang kebijakan publik terutama mengenai dampak suatu kebijakan.
- c. Bagi Instansi Pemerintah Terkait
Diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya kebijakan pendidikan tentang sertifikasi guru.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam memahami suatu dampak kebijakan maupun program, dibutuhkan model analisis yang tepat supaya dampak kebijakannya dapat teridentifikasi dengan tepat juga. Berikut ini adalah model analisis dampak riset kebijakan publik (analysis in public policy research) yang di kemukakan oleh Thomas J. Cook dan Frank P. Schioli Jr. (1975) dalam buku Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan atau Program, sebagai berikut:

Tabel Model Dampak Kebijakan (Policy Impact Model)

Program	Objektif	Activities	Effectiveness Criteria	Impacts
PI		A1	M1	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> I U </div> <div style="margin-top: 10px;"> P <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;"> <p>P1 P2</p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p>S1 S2</p> </div> S </div>
		A2	M2	
		A3	M3	
	01		M4	
		A4		
			M5	
	02		M6	
		A5		
		A6	M7	
	03		M8	
			M9	
		M10		
		M11		
Where: P = Primary Impact I = Intended Primary			S = Secondary Impact U = Unintended Impact	

Sumber: Thomas K. Cook dan Frank P. Schioli Jr., Impact Analysis in Public Policy Research (1975)

Gambar di atas dapat dijelaskan bahwa masing-masing objek dapat saling berkaitan dalam rangka pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Pada bagan pertama adalah berisi nama program yang akan dievaluasi dampak kebijakannya. Biasanya dari nama program dapat dilihat garis besar tujuan yang ingin dicapai program ini. Setelah mengetahui programnya, dapat diketahui dan dijelaskan dengan tepat tujuan dari program tersebut pada bagan kedua. Jika tujuan programnya belum dijelaskan secara detail dan benar, maka dalam pencapaian hasil atau sasaran yang diinginkan. Bagan ketiga berisi macam kegiatan yang dilakukan dalam program sekaligus yang dilanjutkan dengan menentukan kriteria-kriteria apa yang

relevan untuk menilai aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Terakhir adalah bagan tentang dampak program atau kebijakan. Dampak ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu dampak yang dikehendaki / Intended dan dampak yang tidak dikehendaki / Unintended (Ekowati, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel Tu lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Lokasi penelitian ini mengambil tempat di SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. Fokus pada penelitian ini yaitu melihat dampak berdasarkan moel analisis dampak riset kebijakan publik yang menganalisis dampak dengan melusuri program/kebijakan, tujuan, aktifitas yang dilakukan dan kriteria efektifitas. Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari semua guru di SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung yang sudah mengikuti sertifikasi guru sebanyak 10 orang guru. Sumber data di peroleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang di lakukan di SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung. Sedangkan analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Sertifikasi guru merupakan suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Program sertifikasi guru adalah suatu program yang dilakukan pemerintah dibawah kuasa Dinas Pendidikan Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, yang dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut.

Setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada akhirnya akan memunculkan Impact dari kebijakan itu. Impact atau dampak yang diharapkan oleh pemerintah selalu membawa dampak positif agar masalah publik bisa terselesaikan dengan baik. Penelitian ini membahas tentang dampak dari kebijakan sertifikasi guru.

Dari hasil penelitian untuk mengetahui dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang ada di SMPN 1 Kauman Kabupaten Tulungagung akan dibahas lebih lanjut dengan menggunakan teori model analisis dampak kebijakan seperti berikut ini:

Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Tujuan dari sertifikasi guru hampir sepenuhnya tercapai yaitu; 1) meningkatnya kemampuan dan kompetensi guru dengan adanya MGMP yang membantu guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru; 2) kualitas mutu guru menjadi terjamin yang dapat dilihat dengan kewajiban guru membuat penelitian ilmiah tiap tahun yang bertujuan untuk meningkatkan mutu; 3) kesejahteraan guru dan martabat guru menjadi meningkat karena sertifikasi guru mengakui kinerja guru dengan pemberian sertifikat setelah memenuhi proses PLPG atau fortopolio dan; 4) secara tidak langsung kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dengan meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 1 Kauman yang tercantum dalam visi misi sekolah merupakan salah satu tujuan dari sertifikasi guru itu sendiri agar tujuan dari sekolah untuk pendidikan yang lebih baik bisa tercapai.

Setelah memahami tentang tujuan maka akan memahami kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Pada model analisis dampak kebijakan, kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan dari program sertifikasi guru terutama yang ada di SMPN 1 Kauman. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai program sertifikasi guru. Kegiatan sertifikasi guru yang dilakukan di SMPN 1 Kauman selain kegiatan wajib yang tercantum di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan yaitu 1) kegiatan seperti mengajar 24jam/minggu; 2) melakukan penelitian ilmiah; 3) mengikuti workshop; 4) mengikuti MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) tingkat provinsi maupun kabupaten. Selain itu, SMPN 1 Kauman mengadakan MGMPs yaitu musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah yang wajib diikuti oleh bapak ibu guru SMPN 1 Kauman.

Kriteria Efektifitas pada teori model analisis dampak ini yang mendukung kegiatan sertifikasi guru bisa terlaksana dengan baik. Kriteria Sertifikasi Guru yang ada di SMPN 1 Kauman antara lain: 1) meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran siswa-siswi; 2) meningkatkan kompetensi guru dalam memahami materi pelajaran; 3) menumbuhkan kedisiplinan guru pada pekerjaan yang dimiliki; 4) menambah sikap profesionalisme pada pekerjaannya; 5) pemenuhan

kewajiban guru yang sudah memiliki sertifikat yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah yang diadakan setiap tahunnya dan mengajar 24jam/minggu.

Aspek dampak dalam teori model analisis dampak yaitu dampak yang dikehendaki dan dampak yang tidak dikehendaki. Untuk mengetahui bagaimana dampak itu bisa muncul maka dari penjelasan program, tujuan, kegiatan yang dilakukan dalam program, kriteria efektivitas dan selanjutnya di tarik kesimpulan dampak apa yang terdapat pada program atau kebijakan tersebut. Dampak kebijakan muncul setelah kita mengetahui bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Untuk itu, pada penelitian ini akan dibahas tentang dampak apa saja yang ada pada kebijakan sertifikasi guru yang dilaksanakan di SMPN 1 Kauman. Dampak merupakan hasil dari adanya kebijakan yang ada, entah itu dampak yang diharapkan oleh publik maupun dampak yang tidak diharapkan. Dampak sertifikasi guru yang ada di SMPN 1 Kauman bisa dilihat dari:

- 1) Kemampuan dan Kompetensi Guru Menjadi Lebih Baik. Kemampuan dan kompetensi guru merupakan tujuan dari adanya sertifikasi guru agar bisa lebih baik lagi. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru merupakan dampak yang dikehendaki dari adanya sertifikasi guru. Peningkatan kemampuan guru misalnya kemampuan guru dalam mendalami materi pelajaran. Jika guru mampu untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami mata pelajaran dan mengajar maka proses KBM akan berjalan dengan lancar dan juga siswa-siswi memahami apa yang disampaikan oleh guru dan tujuan guru yaitu mentranfer ilmu terlaksana dengan baik. Dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang lain ialah meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru, misalnya kompetensi penguasaan materi. Selain itu, komunikasi sesama guru menjadi lebih baik, karena komunikasi sesama guru mata pelajaran untuk memahami materi baru sangat penting. Dengan melakukan diskusi akan lebih mudah memahami materi yang sulit karena guru bisa saling tukar mendapat untuk memahami materi yang susah. Dengan demikian, peningkatan kompetensi penguasaan materi pelajaran menjadi lebih mudah. Dari dampak kebijakan sertifikasi guru yang untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru merupakan dampak yang dikehendaki karena membawa dampak positif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.
- 2) Guru Lebih Profesional Dan Disiplin Dalam Profesinya. Kedisiplinan guru dan sikap profesionalisme guru merupakan kriteria efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru. Dampaknya bisa dilihat dari peraturan yang mewajibkan guru untuk mengajar

24jam/minggu merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dalam mengajar karena setiap guru yang sudah tersertifikasi mempunyai kewajiban yang sama untuk menuntaskan 24jam/minggu. Dengan kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap guru dalam mengajar maka akan berdampak positif pada pekerjaan guru untuk mentransfer ilmu yang dimiliki. Guru sendiri juga akan merasa disiplin untuk menyelesaikan pekerjaannya karena yang lain juga melakukan kewajiban yang sama, sehingga rasa kedisiplinan guru menjadi terasa. Kedisiplinan yang dimiliki oleh guru akan berdampak pada citra guru yang akan lebih profesional dari sebelumnya. Karena setiap pekerjaan guru bisa selesai dengan baik karena sikap disiplin untuk menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki menjadikan profesionalisme guru sebagai tenaga pendidik menjadi lebih baik. Guru akan menjadi lebih profesional karena guru dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki terselesaikan.

- 3) Meningkatkan Kesejahteraan Dan Martabat Guru. Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan untuk membantu meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam materi pelajaran dan proses belajar mengajar namun berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan guru. Bisa dilihat dari adanya tambahan tunjangan yang diberikan bisa digunakan untuk membeli buku penunjang maupun untuk melakukan penelitian. Selain itu gaji yang diterima tidak akan berkurang dengan pembelian buku penunjang materi karena untuk membelinya sudah didapat dari tunjangan yang diberikan. Selain itu, jika dilihat sekarang ini banyak guru yang memiliki laptop untuk menunjang pekerjaannya karena kemajuan IT saat ini. Dengan begitu kesejahteraan guru tidak hanya gaji yang akan bertambah tetapi juga banyaknya alat penunjang yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai tenaga pendidik adalah bentuk dari kata kesejahteraan. Dengan demikian guru bisa dikatakan sejahtera jika dalam pekerjaan tidak menemukan hambatan dan juga mendapatkan tambahan gaji atas pengakuan yang diterima dari hasil kerja kerasnya dalam mentransfer nilai kepada siswa-siswinya. Kesejahteraan guru merupakan dampak yang dikehendaki dari kebijakan sertifikasi guru karena sebelum adanya sertifikasi guru, pekerjaan guru yang mulai dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kurang mendapat tantangan dalam bekerja yang tidak seperti dokter atau TNI/Polri yang dalam bekerja mendapat tantangan dan kadang hambatan.
- 4) Dampak dari kebijakan sertifikasi guru yang menjadikan guru menjadi lebih termotivasi ialah bisa dilihat dari tabel daftar guru SMPN 1 Kauman yang

sudah sertifikasi. dalam tabel ini, guru yang setiap tahunnya bertambah selisih jumlah yang sudah sertifikasi. Misalnya pada tahun 2008 guru yang sertifikasi berjumlah 5orang, selanjutnya guru menjadi termotivasi untuk mengikuti sertifikasi guru dan pada tahun 2009 guru yang sertifikasi menjadi lebih banyak dari pada tahun 2008 menjadi 10orang. Tahun berikutnya di SMPN 1 Kauman jumlah guru yang mengikuti sertifikasi guru menjadi lebih banyak. Hanya pada tahun 2013, 2014, dan 2015 terdapat masing-masing guru yang mengikuti sertifikasi guru karena sudah tidak ada guru lagi yang bisa mengikuti pendaftaran sertifikasi guru. Jadi secara tidak langsung program sertifikasi guru ini memotivasi guru untuk mengikuti kebijakan guru yang dicanangkan oleh pemerintah. Kebijakan sertifikasi guru dapat memotivasi guru dikarenakan dalam program ini guru di tuntut untuk lebih unggul dalam kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Misalnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi informasi saat ini. Dengan kemajuan IT internet merupakan sarana penunjang bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Email merupakan salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan guru untuk mempermudah pekerjaannya dengan menggunakannya untuk mengumpulkan tugas dari siswa-siswi. Sehingga guru-guru yang sudah senior bisa termotivasi untuk menggunakan email yang dimiliki untuk mengumpulkan tugas siswa-siswi dan tidak hanya mempunyai email saja tapi juga bisa digunakan dalam kesehariannya. Oleh sebab itu, guru menjadi termotivasi untuk belajar menambah wawasan yang ada agar bisa mengikuti perkembangan saat ini, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 5) Kebijakan sertifikasi guru memiliki tujuan ialah agar profesi guru sebagai tenaga pendidik mendapatkan pengakuan dan tidak dipandang sebelah mata. Kebijakan ini ada, sebab profesi guru kurang mendapat perhatian dari pemerintah dalam peningkatan pendidikan. Untuk itu, guru sebagai ujung tombak dalam dunia pendidikan menjadi lebih termotivasi karena adanya dampak dari pengakuan atas kinerja guru. Pengakuan terhadap kinerja guru menjadikan guru menjadi lebih termotivasi dalam mengajar karena apa yang dikerjakan oleh guru mendapat pengakuan dari pemerintah. Pengakuan yang diberikan pemerintah terhadap tenaga pendidik yang merupakan apa yang dicita-citakan oleh kebanyakan guru karena guru sebagai tenaga pendidik bisa lebih leluasa untuk mentransfer ilmu kepada siswa-siswi.

- 6) Guru Menjadi Individu Lebih Konsuntif. Sertifikasi guru yang memberikan tunjangan bagi guru dengan tambahan sekali gaji tiap 3bulan sekali, akan memanfaatkan tunjangan tersebut untuk urusan guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Jika tunjangan yang ada digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti kredit motor baru, kredit mobil, dan lain sebagainya maka tujuan tunjangan tersebut akan berbeda dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Tunjangan yang menyertai sertifikasi guru diharapkan pemerintah mampu untuk mendukung guru dalam peningkatan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki agar berdampak pada kinerja guru tersebut. Jika pada kenyataannya guru menggunakan untuk pembelian barang-barang mewah seperti kredit motor dan mobil yang jauh dari tujuan adanya tunjangan tersebut maka sertifikasi guru akan berdampak pada pembentukan guru sebagai individu konsumtif. Oleh sebab itu dampak sertifikasi guru dalam pemberian tunjangan yang menjadikan guru menjadi menjadi individu konsumtif merupakan dampak yang tidak diinginkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru.
- 7) Dampak kebijakan sertifikasi guru tidak hanya dampak yang dikehendaki namun juga terdapat yang tidak dikehendaki seperti adanya asumsi bahwa sertifikasi membawa banyak pekerjaan seperti kewajiban penelitian ilmiah yang sebenarnya baik untuk kemajuan guru, tapi guru sendiri beranggapan bahwa kewajiban itu memusingkan dan menambah beban guru. Padahal penelitian ilmiah itu diharapkan pemerintah agar guru menjadi lebih aktif dalam memperdalam wawasan yang dimiliki sehingga tidak mudah untuk berpuas diri. Dengan bertambahnya wawasan yang dimiliki oleh guru bisa membantu guru dalam proses KBM di kelas karena bisa berbagi lebih banyak pengetahuan pada siswa-siswi. Sertifikasi guru dianggap oleh guru dengan persepsi yang berbeda dengan apa yang merupakan tujuan dari program ini, karena dari hasil penelitian banyak guru-guru yang beranggapan kalau sertifikasi merupakan langkah guru bisa mengaplikasikan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki agar lebih baik lagi untuk kemajuan dunia pendidikan.
- 8) Beban Kerja Dan Kewajiban Guru Menjadi Bertambah. Sertifikasi guru membawa dampak negatif pada beban kerja guru menjadi lebih bertambah dengan mengajar 24jam/minggu dan penelitian ilmiah yang dikerjakan setiap tahunnya. Guru yang bisa memenuhi 24jam/minggu maka bisa memenuhi beban kerja yang dimiliki, namun jika guru tidak bisa memenuhi 24jam/minggu maka akan menambah di sekolah lain agar tercapai

24jam/minggu. Ini membawa dampak negatif jika guru hanya menganggap kewajiban yang harus dipenuhi agar mendapatkan tunjangan tanpa mengingat tugas guru yang utama yaitu menyalurkan ilmu yang dimiliki untuk pendidikan bangsa Indonesia. Selain kewajiban 24jam/minggu ada juga kewajiban penelitian ilmiah yang harus dilakukan oleh guru setiap tahunnya. Penelitian ini membawa dampak positif karena akan menambah wawasan guru dalam pengerjaannya, namun akan membawa dampak negatif jika guru beranggapan hanya kewajiban saja yang harus terpenuhi agar tunjangan dari sertifikasi bisa terus didapat. Untuk itu guru yang berasumsi bahwa penelitian ilmiah hanya kewajiban yang harus dipenuhi tanpa menarik ilmu yang didapat maka akan berdampak negatif, karena guru akan copy paste penelitian sebelumnya untuk memenuhi kewajiban tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Program sertifikasi guru adalah suatu program dilaksanakan melalui LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah dengan pemberian sertifikat kepada guru yang telah berhasil mengikuti program tersebut. Tujuan dari sertifikasi guru ini ialah guru diharapkan bisa meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme mereka dalam mengajar siswa siswi. Selain itu dengan adanya sertifikasi guru kesejahteraan guru jadi terjamin dengan adanya dana tunjangan yang diterima guru setelah mendapatkan sertifikat pendidik. Kegiatan yang dilakukan di SMPN 1 Kauman yaitu mengadakan musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah yang wajib diikuti oleh bapak ibu guru SMPN 1 Kauman. Kegiatan MGMP tingkat sekolah merupakan diskusi antar sesama guru mata pelajaran yang bisa bekerjasama untuk membahas materi yang baru didapat dari hasil workshop atau seminar yang sebelumnya diikuti yang diharapkan membawa dampak positif. Kegiatan sertifikasi guru yang ada semuanya diharapkan untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme guru dalam mengajar yang akhirnya diharapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kriteria Sertifikasi Guru yang ada di SMPN 1 Kauman yang bisa mencapai tujuan kebijakan antara lain: meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran siswa-siswi, meningkatkan kompetensi guru dalam memahami materi pelajaran, menumbuhkan kedisiplinan guru pada pekerjaan yang dimiliki, menambah sikap profesionalisme pada pekerjaannya, pemenuhan kewajiban guru yang sudah memiliki

sertifikat yaitu dengan melakukan penelitian ilmiah yang diadakan setiap tahunnya dan mengajar 24jam/minggu. Kebijakan sertifikasi guru yang berdampak dikehendaki antara lain ialah kemampuan dan kompetensi guru menjadi lebih baik, guru lebih profesional dan disiplin dalam profesinya, kesejahteraan guru menjadi lebih meningkat, guru termotivasi meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada, seperti internet dan email yang digunakan untuk pengumpulan tugas siswa dan menambah wawasan guru, dan kinerja guru lebih diakui oleh pemerintah. Sedangkan dampak yang tidak diinginkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru ialah guru lebih banyak menuruti keinginannya sebagai individu konsumtif, Beban Kerja Dan Kewajiban Guru Menjadi Bertambah dan menjadi mudah berpuas diri dengan apa yang telah dicapai sehingga tidak mengembangkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

Saran

Dampak kebijakan sertifikasi guru dapat memberikan banyak dampak positif yang dikehendaki. Namun, ada juga dampak negatif yang tidak diinginkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru. Oleh karena itu, penulis memberikan saran terhadap sertifikasi guru yang ada di SMPN 1 Kauman sebagai berikut:

1. Motivasi guru lebih ditingkatkan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti internet dan email yang digunakan untuk pengumpulan tugas siswa dan menambah pengetahuan guru dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru.
2. Asumsi guru yang menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari kemampuan guru yang berakibat guru cepat puas setelah menerima sertifikasi tersebut. Sebaiknya, kedepannya guru menganggap sertifikasi guru sebagai titik awal dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan profesional sebagaimana standar dari pemerintah bagi guru yang diharapkan mampu diaplikasikan untuk sekolahnya guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV Alvabeta: Bandung.
- Bungin, B. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.

- Ekowati, L. (2009). *Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kebijakan Teoritis dan Praktis)*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Hurmaini, M. (2011). *Dampak Pelaksanaan Sertifikasi Guru terhadap Peningkatan Kinerja Guru dalam Proses Pembelajaran: Studi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Jambi*. 1-34.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dengan Rangka Penataan dan Pemerataan
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suwardi. (2012). *Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Kualitas Guru*, 1-19.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2012). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media Publishing.